71

Makalah Pembahasan Terhadap :

MAKALAH KUNCI MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Dudung Darusman

Disampaikan pada Panel Diskusi Pengusahaan Hutan Produksi, di Jakarta 29 Oktober 1998

1. Sebagai Bangsa Indonesia, kita menginginkan masyarakat yang maju dan sejahtera serta mampu menghadapi persaingan global di masa datang. Kontribusi yang diharapkan masyarakat secara keseluruhan di suatu wilayah atau negara terhadap setiap usaha ekonomi yang ada di wilayahnya adalah sejauh mana peranannya dalam meningkatkan aspek-aspek efisiensi yang dapat menunjang kesejahteraan, kemajuan dan ketahanan masyarakat tersebut. Aspek-aspek efisiensi yang dimaksud meliputi :

   a. *Efisiensi usaha*, yang mecakup :

      1. Efisiensi fisik : pertumbuhan, randemen, dsb.
      2. Efisiensi ekonomi : daya kompetitif dengan kegiatan ekonomi lainnya
      3. Efisiensi finansial : tingkat keuntungan usaha

   b. *Efisiensi wilayah/nasional*, yang mencakup :

      1. Efisiensi pendapatan/penerimaan negara, untuk fasilitas pelayanan umum dan pembangunan
      2. Efisiensi pertumbuhan PDRB dan lapangan kerja
      3. Efisiensi pemerataan pendapatan, lapangan kerja, dan kesempatan usaha
      4. Efisiensi pemerataan/keseimbangan struktur industri, dari hulu sampai ke hilir, dan pemasarannya
      5. Efisiensi pemerataan/keseimbangan pembangunan antar daerah, dsb.

   c. *Efisiensi pemeliharaan kapasitas lingkungan hidup*, seperti atmosfer yang semakin bersih, siklus hidrologi yang semakin baik, kesuburan tanah semakin terpelihara, dsb.

   d. *Efisiensi pemeliharaan keanekaragaman hayati* (*biodoversity*) : tetap terjaganya ketersediaan sumberdaya genetik untuk kesejahteraan generasi yang akan datang.

   Harapan seluruh masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha ekonomi, baik yang besar, menengah maupun yang kecil, agar masyarakat menjadi maju, sejahtera dan tahan secara berkelanjutan.

2. Masing-masing ukuran skala usaha ekonomi (besar, sedang, dan kecil) memiliki kelebihan-kelebihannya masing-masing dalam kontribusinya terhadap aspek-aspek efisiensi tersebut di atas. Secara bersama-samalah seluruh aspek efisiensi dapat ditingkatkan sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat maksimal. Tidak ada yang memiliki kelebihan dalam segala hal. Oleh karena itu perilaku ekonomi dalam suatu wilayah/negara atau suatu sektor (termasuk kehutanan) seharusnya terdiri dari berbagai ukuran secara lengkap dan seimbang.

   Dapat diibaratkan menangkap kekuatan air sungai dengan bendungan. Bila kita menggunakan batu-batu yang besar saja agar kuat dan tidak hanyut maka air akan tetap lolos, bila batu-batu yang sedang saja akan lemah, dan tentu saja bila hanya pasir maka begitu ditaruh langsung hanyut. Bila kita menggunakan segala macam ukuran batu, mulai yang besar, sedang, dan kecil secara lengkap dan seimbang, maka kekuatan air akan dapat ditahan dan memberi manfaat secara maksimal.

3. Kegiatan ekonomi kehutanan di Indonesia saat ini (hampir) seluruhnya diisi/dikuasai pelaku usaha berskala besar dengan jumlah yang sangat ekstrim sedikit. Walaupun begitu, yang sedikit dan berskala besar itu efisiensinya masih rendah.

   Sesungguhnya apabila diserahkan secara wajar dan alamiah kepada mekanisme pasar dan serta potensi yang ada di masyarakat, sekarang ini struktur pelaku usaha kehutanan diperkirakan telah lengkap dan seimbang. Sayangnya kebijaksanaan pemerintah pada masa lalu bersifat intervensi menahan dan mematikan pelaku usaha berskala menengah dan kecil.

   Jelaslah, pelaku usaha menengah dan kecil yang sangat diperlukan itu masih harus dimunculkan. Langka-langkah kebijaksanaan reformasi yang tercantum pada butir-butir 2, 3, dan 5 dalam makalah Bpk. Menteri, kiranya sangat sesuai dengan kepentingan di atas.

   Upaya pemunculan pelaku usaha menengah dan kecil harus dilakukan dengan cara wajar dan alamiah. Kekuatan-kekuatan potensial pelaku skala menengah dan kecil yang sesungguhnya sangat besar dapat dibangkitkan dengan cara memberikan kesempatan usaha yang lebih luas sebagai suatu hak warganegara, tanpa harus memberikan insentif dan dukungan yang berlebihan, sebab khawatir yang muncul nanti bukanlah calon-calon yang kuat, tapi calon-calon yang *opportunistic.*

   Khusus dalam hal peran organisasi koperasi, kiranya tidak perlu menjadi syarat atau keharusan, bukan karena koperasi itu tidak baik tapi karena koperasi itu tampaknya masih terlalu canggih bagi rakyat Indonesia. Sesungguhnya koperasi itu adalah bentuk *advance* dari entitas bisnis perorangan, yakni plus entitas sosial. Koperasi tidak akan berhasil sebagai entitas sosial bila anggota/pelakunya belum kuat memahami/menguasai entitas bisnisnya.

   Jadi, mungkin saja akan terlalu berat dan jauh bagi pelaku ekonomi menengah dan kecil untuk masuk usaha kehutanan, apabila organisasi koperasi menjadi syarat atau keharusan. Sesuatu yang canggih mungkin belum diperlukan bagi masyarakat yang masih tradisional. Bahkan mungkin sekali, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tradisional telah mengandung banyak unsur koperasi.

4. Ketidak-sukaan pada masa lalu jangan sampai mengesampingkan atau mengabaikan upaya membina pelaku usaha yang besar agar menjadi kuat dan efisien, karena itu juga sangat diperlukan seperti telah dikemukakan terdahulu. Kita memang prihatin bahwa setelah melewati masa 30 tahun HPH dan Industri Hasil Hutan di Indonesia masih belum dewasa dan tangguh.

   Kebijaksanaan yang bersifat membina HPH dan Industri Hasil Hutan masih sangat diperlukan, baik yang bersifat mendorong perbaikan internal : sumberdaya manusia yang profesional, penerapan teknologi yang tepat-guna, motivasi usaha bertanggungjawab, dll., maupun yang bersifat mendorong perbaikan eksternal : menciptakan suasana dan mekanisme pasar yang kompetitif, dll.

   Dalam motivasi usaha, kita sudah lama prihatin terhadap para pelaku usaha besar (khususnya pihak pemilik), yang selama ini menempatkan usaha kehutanan sebagai usaha memutar uang saja, kurang mendengar aspirasi pihak lain dan bentuk kepentingan lain yang juga diperlukan bagi bangsa ini untuk maju dan sejahtera dan eksis di antara berbagai bangsa lain di dunia. Para pelaku usaha besar hendaknya dengan kesadaran sendiri memperbaiki motivasi usaha mereka agar sesuai dengan kepentingan bersama sebagai suatu bangsa, jangan hendak dipaksa.

Demikianlah butir-butir yang dapat saya kemukakan sebagai pembahasan makalah kunci Bpk. Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Semoga bermanfaat.